



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019



PRISMA

APLIKASI PERENCANAAN
STRATEGIS DAN
MANAJEMEN KINERJA



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2019 dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2019 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dimohonkan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 31 Januari 2020
Kepala Perwakilan,

Ayub Amali
NIP 196903211996031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	5
BAB II Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	7
Anggaran, Indikator dan Target Kinerja 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	8
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV Penutup	32
Lampiran	
- Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana tertuang pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja di antaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Sedangkan pada lingkungan internal BPK dinyatakan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

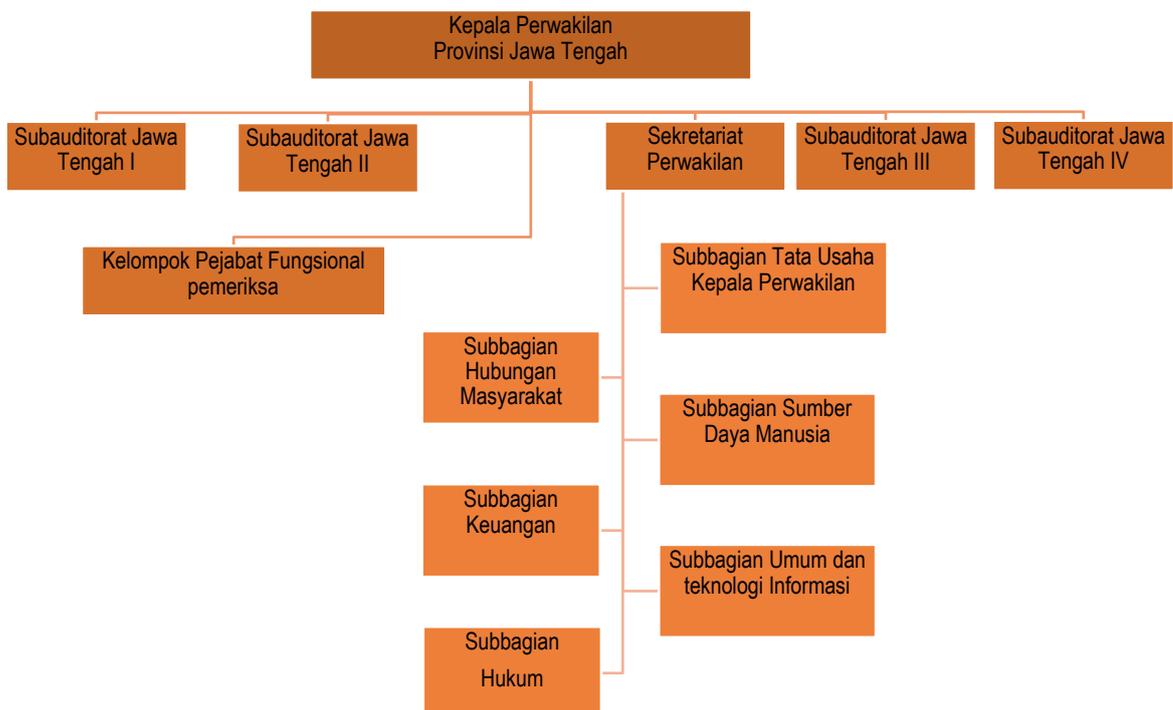
Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hukum hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III

1. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
 - e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. Subauditorat Jawa Tengah I mempunyai tugas:
 - a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

3. Subauditorat Jawa Tengah II mempunyai tugas:
 - a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
4. Subauditorat Jawa Tengah III mempunyai tugas:
 - a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
5. Subauditorat Jawa Tengah IV mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

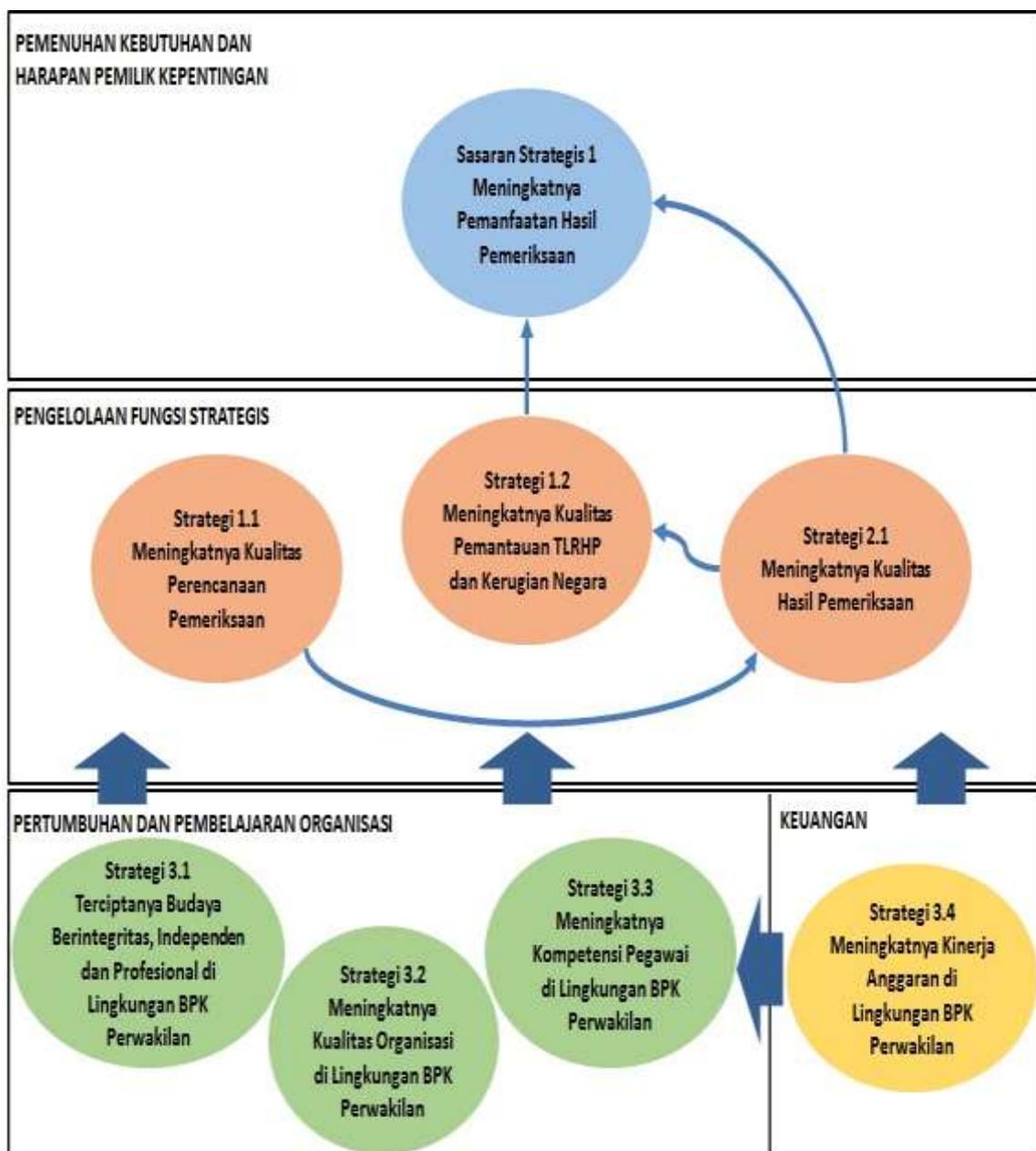
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada akhir bulan Desember 2019 berjumlah 259 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 6 orang Kepala Subbagian dan 151 orang pejabat fungsional pemeriksa, 67 orang staf penunjang serta 30 orang tenaga kontrak. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 47.858.366.000,00.

BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun indikator kinerja dan target kinerja tahun 2019. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2019

Strategi	Indikator Kinerja	Target
Misi Utama: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IK.1.1: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	75%
	IK.1.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.1.3: Tingkat Pemenuhan Perencanaan Penganggaran yang Berkeadilan	100%
Strategi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IK.1.1.1: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dasar	80%
	IK.1.1.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.1.1.3: Tingkat Pemenuhan Perencanaan Penganggaran yang Berkeadilan	100%
	IK.1.1.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
Strategi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berkeadilan	IK.2.1: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
	IK.2.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.2.3: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
	IK.2.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
Strategi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Inovatif	IK.3.1: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
	IK.3.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.3.3: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
	IK.3.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%

Realisasi Anggaran Negara dan Pembiayaan Prioritas Kinerja Negara
 Jakarta, Februari 2019
 Rp47.878.340.000,00

Wakil Ketua: Dr. Bambang Purwanto, MBA., CA., Ak.
Wakil Ketua: H. Iwan Yanto, M.T.
Wakil Ketua: Prof. Dr. Iskandiah Adnan, MBA.
Wakil Ketua: Prof. Dr. Supriatno Soeryo Utomo, CA., CPA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja
Misi Utama: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Rp1.570.507.000,00	IK.1.1: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
	IK.1.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.1.3: Tingkat Pemenuhan Perencanaan Penganggaran yang Berkeadilan	100%
	IK.1.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
Strategi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Rp4.100.100.000,00	IK.1.1.1: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dasar
	IK.1.1.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.1.1.3: Tingkat Pemenuhan Perencanaan Penganggaran yang Berkeadilan	100%
	IK.1.1.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
Strategi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berkeadilan	Rp4.000.000.000,00	IK.2.1: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti
	IK.2.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.2.3: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
	IK.2.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
Strategi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Inovatif	Rp4.000.000.000,00	IK.3.1: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti
	IK.3.2: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditanggapi dan Ditutupi	100%
	IK.3.3: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%
	IK.3.4: Jumlah Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	100%

Anggaran Pembiayaan Kinerja Negara dan Pembiayaan Prioritas Kinerja Negara
 Jakarta, Februari 2019
 Rp47.878.340.000,00

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah:
 Aryo Anadi, S.E., M.M., Ak., CA.

STRATEGI, ANGGARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2019

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp7.272.925.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp11.646.116.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp4.644.594.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp11.363.011.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp3.803.374.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp6.883.773.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja		Target
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	3
Strategi 3.3 - Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.889.402.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp355.171.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Dari tabel target pencapaian kinerja 2019 diatas dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

SS 1: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan empat Indikator Kinerja Utama yakni IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pada Tahun 2019 Perwakilan Jawa Tengah menentukan target sebesar 75% penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat respon dan analisa temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti. Untuk IKU ini Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menentukan target pencapaian sebesar 100%, dengan tujuan setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi untuk dianalisa dan disampaikan ke IPH.

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli. Target pencapaian yang ditentukan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebesar 100%.

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pelaksanaan tugas / kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Target pencapaian yang telah ditentukan sebanyak 1.

Strategi 1.1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Strategi ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja yakni IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan, IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP, dan IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. Untuk IK ini Perwakilan Jawa Tengah menentukan target pencapaian sebesar 95%.

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IK ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK berupaya meningkatkan peran serta dalam mewujudkan Good Governance yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Target pencapaian yang ditentukan untuk IK ini sebesar 30%, namun pada tahun berjalan IK ini direvisi targetnya menjadi 25% karena menyesuaikan dengan kebijakan yang ada.

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Target pencapaian yang telah ditentukan untuk IK ini sebesar 100%

Strategi 1.2 : Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Strategi ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja yakni IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IK 1.2.3 Katepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Pencapaian IK ini ditargetkan sebanyak 72 laporan.

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara, khususnya melalui SIKAD agar tepat waktu. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.

Strategi 2.1 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Strategi ini diukur dengan empat Indikator Kinerja yakni IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dan IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IK ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP. IK ini ditargetkan sebesar 100% pencapaiannya.

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 3,9.

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas / stakeholder. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 100%.

IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP BPK digugat dan dinyatakan menang berarti menunjukkan LHP yang berkualitas. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 100%.

Strategi 3.1 : Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan

Strategi ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja yakni IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 5,0.

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai Dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Pencapaian IK ini ditargetkan sebesar 5,0.

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

Strategi 3.2 : Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Strategi ini diukur dengan tujuh Indikator Kinerja yakni IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 3.2.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*, IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*, IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IK ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IK ini dengan nilai AA.

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 95%.

IK 3.2.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*

IK ini bertujuan mengukur tingkat penyusunan jumlah *best-practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IK ini sebanyak 1.

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

Indikator ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja / satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Triwulanan, dan Laporan Output secara tepat waktu. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 91%.

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IK ini sebanyak 3.

Strategi 3.3 : Meningkatkan Kualitas Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Strategi ini diukur dengan dua Indikator Kinerja yakni IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

Strategi 3.4 : Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Strategi ini diukur dengan satu Indikator Kinerja yakni IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 80%.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019

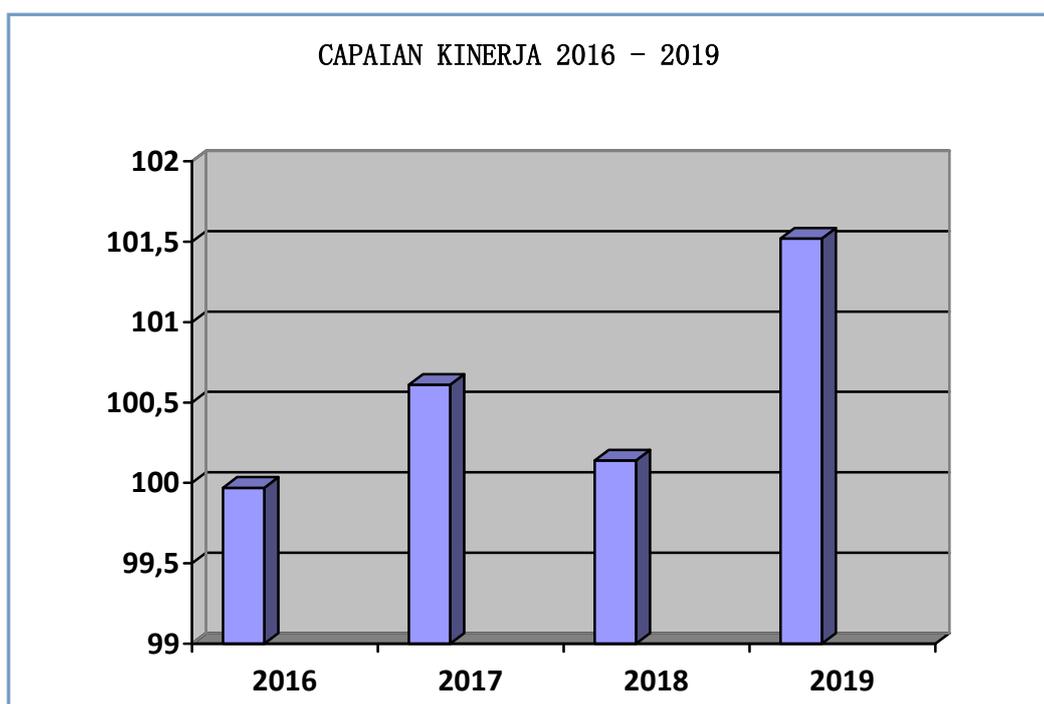
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan	
(1)	(2)		(3)	TW I	TW II	TW III			TW IV
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	-	-	-	-	1	Desember	
Strategi 1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	0%	0%	0%	0%	25%	Desember	
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	0%	0%	0%	0%	100%	Desember	
Strategi 1.2	Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	50%	50%	100%	Desember	
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	0	36	36	36	72	Desember	
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Desember	
Strategi 2.1	Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i>	3,90	0	3,90	3,90	3,90	3,90	Desember	

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	atas Kinerja Pemeriksa BPK							
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember	
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember	
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
Strategi 3.2	Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	-	-	-	AA	Desember	
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	-	-	-	1	Desember	
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	-	-	-	100%	Desember	
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	52%	68%	84%	100%	Desember	
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91%	91%	91%	91%	Desember	
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	0	1	1	3	Desember	
Strategi 3.3	Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	30%	50%	80%	100%	Desember	
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	10%	40%	80%	100%	Desember	
Strategi 3.4	Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	80%	80%	80%	80%	Desember	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target IKU. Skor kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebesar 101,54, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang memperoleh skor sebesar 100,14. Berikut kami sajikan capaian kinerja Perwakilan Jawa Tengah tahun 2016 s/d 2019 :



Secara umum capaian kinerja di tahun 2019 mengalami peningkatan dari 3 tahun sebelumnya, namun masih terdapat target IKU yang belum tercapai, antara lain :

- 1) IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK
- 2) IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
- 3) IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2019	Realisasi 2019	Skor Kinerja
SS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan			
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,72%	105,00
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	102%	102,00
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
Strategi 1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan			
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	105,00
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	25,76%	103,03
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100,00
Strategi 1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara			
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	72	100,00
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
Strategi 2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan			
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100,00
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,59	105,00
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
Strategi 3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan			
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,57	91,40
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,86	97,20
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00
Strategi 3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan			
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	AA	100,00
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,01%	104,22
IK 3.2.3	Jumlah <i>best-practice</i> yang disusun	1	1	100,00

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2019	Realisasi 2019	Skor Kinerja
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>best-practice</i>	100%	100%	100,00
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91%	91,60%	100,66
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	4,2	105,00
Strategi 3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan			
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100,00
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	98,72%	98,72
Strategi 3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan			
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	87,97%	105,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Skor IKU 1.1 pada tahun 2019 adalah 105,00, realisasi sebanyak 85,72% tindak lanjut telah sesuai rekomendasi dari target sebesar 75%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2018 dan tahun 2017, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	75%	85,72%	76,92%	74,83%

Data capaian pada tahun 2019 merupakan data tindak lanjut yang disajikan pada aplikasi SMP dari tahun 2005 s/d 2019 yang digunakan sebagai bahan IHPS Semester II tahun 2019. Peningkatan capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara periodik yaitu per Semesteran dengan mengundang Inspektorat dan pihak-pihak terkait di seluruh entitas Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2019

**IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH**

Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi pada tahun berjalan untuk dianalisa dan disampaikan ke IPH oleh Auditorat Utama Investigasi. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%	100%	100%

Skor kinerja IKU 1.2 pada tahun 2019 adalah 100, skor ini sama dengan tahun 2018 dan 2017, karena di tahun 2017 - 2019 tidak ada temuan yang berindikasi tindak pidana. IKU ini merupakan IKU bonus, jika tidak ada temuan yang berindikasi tindak pidana, maka tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan.

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dibandingkan dengan Pemenuhan atas Permintaan Penghitungan Kerugian Negara tersebut dan persentase jumlah Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dibandingkan dengan Pemenuhan atas Permintaan Pemberian Keterangan Ahli tersebut. IKU ini merupakan IKU bonus yang berarti apabila tidak ada realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor IKU. Skor IKU 1.3 tahun 2019 adalah 102, realisasi sebesar 102% dengan target 100%. Capaian ini menurun dibandingkan capaian pada tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	102	100%	102%	104%	101%

Penurunan capaian ini dikarenakan jumlah Permintaan Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan yang dipenuhi pada tahun 2019 lebih sedikit dari tahun 2018, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 2 dan tahun 2018 sebanyak 4.

Pemberian Keterangan Ahli oleh Denny Prasetyo



IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	1	1

Pada tahun 2019 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan 1 bahan pendapat yaitu "Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 - 2018 pada Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Purworejo". Pencapaian telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 1 dengan Skor 100. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2018 dan 2017.

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. Skor IK 1.1.1 pada tahun 2019 adalah 105, realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 95%. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105	95%	100%	100%	N/A

Pengukuran atas IK ini adalah membandingkan kesesuaian antara RKP dengan Renstra dan kesesuaian AO dengan TSAO (termutakhir).

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Skor IK ini adalah 103,03, realisasi sebesar 25,76% dengan target 25%. Capaian ini menurun dari capaian tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	103,03	25%	25,76%	28%	25%

Penurunan capaian ini dikarenakan berkurangnya jumlah pemeriksaan kinerja di tahun 2019. Pada saat penyusunan target PK 2019 ditetapkan target sebesar 30%, namun di tahun berjalan terdapat kebijakan yang menyebabkan revisi terhadap jumlah pemeriksaan kinerja yang semula 20 LHP (30%) menjadi 16 LHP (25%).

Penyerahan LHP Kinerja Tahun 2019**IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP**

IKU ini menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan. Skor IK 1.1.3 adalah 100, realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100	100%	100%	100%	N/A

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi LHP atas kesesuaian simpulan dengan TSAO.

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Skor IK 1.2.1 tahun 2019 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan dimutakhirkan per Semesteran yaitu Semester I dan II 2019. Capaian konsisten dengan capaian tahun 2018 dan 2017 seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keugian Negara						
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Pencapaian tersebut sejalan dengan semangat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar rekomendasi yang diperoleh sebagai hasil dari pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secepat mungkin oleh entitas sehingga dapat mengurangi dan memperbaiki permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan lapangan.

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Skor IK 1.2.2 tahun 2019 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 72 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Capaian tersebut konsisten dari tahun – tahun sebelumnya seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keugian Negara						
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	72	72	72	72

Pencapaian ini akan terus dipertahankan dengan melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah setiap semesteran pada semua entitas pemeriksaan.

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input aplikasi SIKAD. Skor IK 1.2.3 tahun 2019 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Data penyelesaian kerugian negara/daerah sudah diinput di Aplikasi SIKAD secara tepat waktu. Capaian tersebut konsisten dari tahun – tahun sebelumnya, untuk itu akan terus dipertahankan.

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keugian Negara						
1.2.3	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%	100%	100%

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan visi BPK RI untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, BPK menetapkan sistem perolehan keyakinan mutu yang memadai, yaitu memastikan bahwa pemeriksaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis pemeriksaan.

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	100%

Skor IK 2.1.1 tahun 2019 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pemeriksaan yang dilakukan adalah 36 pemeriksaan LKPD, 17 pemeriksaan kinerja, dan 13 pemeriksaan DTT semua sudah melalui *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA). Capaian ini konsisten dengan tahun – tahun sebelumnya.

Konsiyering Reviu Pembahasan KHP**IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK**

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,90	4,59	4,59	4,25

Skor IK 2.1.2 tahun 2019 adalah 105, realisasi sebesar 4,59 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,90. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyebarkan kuesioner survey kepuasan kepada 36 Pemerintah Daerah atas kinerja pemeriksa BPK pada pemeriksaan LKPD, 17 Pemeriksaan Kinerja, dan 13 Pemeriksaan DTT.

Capaian ini konsisten dengan tahun – tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa para pemeriksa telah mengimplementasikan nilai – nilai dasar dan kode etik BPK pada saat melaksanakan pemeriksaan.

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Pengukuran IK ini dilakukan atas seluruh jenis pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu. Skor IK 2.1.3 tahun 2019 adalah 100, realisasi sebesar 100% sesuai dengan target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 36 LHP atas LKPD TA 2018, 36 LHP atas Pertanggungjawaban Banparpol, 17 LHP Kinerja dan 13 LHP DTT diserahkan tepat waktu. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2018 dan 2017, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%

Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dalam manajemen waktu selama proses pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan. Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

Penyerahan LHP Semester II 2019



IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100	100%	100%	100%	100%

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK

berkualitas. Skor kinerja IK 2.1.4 pada tahun 2019 adalah 100, realisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun sebelumnya.

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK

IK ini untuk mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IK ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala penilaian hasil survey ini adalah 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan, 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan, 3,00 – 3,99 = memuaskan, dan 4,00 – 4,99 = sangat memuaskan.

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan						
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	91,40	5,0	4,57	3,67	N/A

Skor IK 3.1.1 pada tahun 2019 adalah 91,40, realisasi sebesar 4,57 dengan target sebesar 5,0. Dengan capaian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai – nilai dasar BPK sangat baik. Capaian ini meningkat dari tahun 2018. Pengukuran atas IK ini yaitu dengan menyebar kuesioner *survey* terkait pemahaman visi, misi dan nilai – nilai dasar BPK kepada semua pegawai melalui pesan elektronik (*e-mail*). Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK ini mengukur tingkat penerapan nilai – nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IK 3.1.2 juga diukur melalui survey dengan skala yang sama dengan IK 3.1.1.

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan						
3.1.2	Indeks Impelementasi Nilai Dasar BPK	97,20	5,0	4,86	4,68	N/A

Skor IK 3.1.2 pada tahun 2019 adalah 97,20, realisasi sebesar 4,86 dengan target sebesar 5,0. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai – nilai dasar BPK telah menjadi budaya kerja yang telah diterapkan dengan baik oleh para pegawai. Capaian ini meningkat dari tahun 2018. Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan						
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%	100%	99,53%

Skor IK 3.1.3 pada tahun 2019 adalah 100, realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Pengukuran IK ini adalah dengan membandingkan jumlah pegawai yang melanggar kode etik dan peraturan

disiplin dengan jumlah semua pegawai. Capaian ini konsisten dengan capaian 2018 dan meningkat dari tahun 2017 hal ini dikarenakan pada tahun 2019 tidak terdapat pegawai yang melanggar kode etik dan peraturan disiplin. Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Skor IK 3.2.1 pada tahun 2019 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu nilai AA, capaian ini meningkat dari tahun – tahun sebelumnya seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	AA	AA	BB	A

Peningkatan capaian ini merupakan hasil kerja keras Perwakilan Jawa Tengah dengan Satuan Kerja lain yang terkait dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama. Kami berkomitmen akan menjaga capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang telah disediakan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengukuran IK ini adalah dengan memperhitungkan persentase pemanfaatan beberapa aplikasi diantaranya yaitu : Layanan Dasar (*e-mail*, *e-drive*, dan portal BPK), Layanan Kelembagaan (SISDM), dan Layanan Pemeriksaan (SMP dan SIPTL).

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,22	95%	99,01%	98,88%	67,51%

Skor IK 3.2.2 tahun 2019 adalah sebesar 104,22, realisasi sebesar 99,01% melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 95%. Capaian ini meningkat dari tahun 2018 dan 2017. Peningkatan ini disebabkan karena layanan teknologi dan informasi yang tersedia sudah tersinkronisasi dengan baik antara aplikasi yang satu dengan yang lain. Selain itu juga semua kegiatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengadministrasian dilakukan menggunakan aplikasi yang telah tersedia.

IK 3.2.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi best practice. IK 3.2.3 tahun 2019 memperoleh skor 100, realisasi sesuai dengan

target yang telah ditentukan yaitu 1 usulan *best-practice*. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	100	1	1	1	N/A

Perwakilan Jawa Tengah mengusulkan 1 usulan *best-practice* yaitu dengan judul "Metode ANalisa TAF < Tentative Audit Finding > (MANTAF) dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Pemeriksaan". MANTAF ini merupakan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kepala Subauditorat Jawa Tengah I. Usulan ini dinilai oleh tim penilai usulan *best-practice* masuk kategori *Innovative Practice*.

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

Best-Practice yang harus diterapkan adalah *Best-Practice* ditetapkan dan telah dilengkapi dengan pedoman pelaksanaannya. Skor IK 3.2.4 tahun 2019 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100%. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100	100%	100%	100%	N/A

Pengukuran IK ini adalah setiap Satuan Kerja diharuskan memilih salah satu *best-practice* yang sudah ada untuk direplikasi di satuan kerjanya masing-masing. Perwakilan Jawa Tengah memilih mereplikasi Pemanfaatan Layanan Pojok Berita untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan.

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100	100%	100%	100%	100%

Skor IK 3.2.5 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Capaian ini konsisten dengan capaian tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Perwakilan Jawa Tengah telah menyampaikan 1 Laporan Kinerja Tahunan, 3 Laporan Kinerja Triwulanan, dan 12 Laporan Output Bulanan secara tepat waktu. Kami berkomitmen akan mempertahankan capaian IK ini pada periode tahun – tahun berikutnya.

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu

pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100,66	91%	91,60%	91,60%	91,59%

Skor IK 3.2.6 pada tahun 2019 adalah 100,66, realisasi sebesar 91,60% dengan target sebesar 91%. Capaian ini konsisten dari tahun – tahun sebelumnya, karena sarana dan prasarana di Perwakilan Jawa Tengah sudah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media masa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media masa. Skor IK 3.2.7 tahun 2019 adalah 105, realisasi sebesar 4,2 dengan target 3. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2018 dan 2017, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	105	3	4,2	4,1	3,1

Pada tahun 2019 Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan 4 siaran pers (masing-masing bobot nilai 0,8), 1 *coffee morning* dan 1 *talkshow* (masing-masing bobot nilai 0,5).

Coffee Morning BPK Jateng dan Media



IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Pada tahun 2019 IK 3.2.7 mendapat skor 100, realisasi sesuai dengan target 100%. Capaian ini meningkat dari tahun 2018 dan 2017, dapat dilihat dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100	100%	100%	97,20%	97,81%

Semua pemeriksa yaitu sebanyak 147 orang dari 153 orang telah mengikuti Diklat baik yang dilaksanakan di Badiklat, Balai Diklat ataupun di Kantor Perwakilan Jawa Tengah. Sebanyak 4 orang pemeriksa tidak diperhitungkan di Perwakilan Jawa Tengah karena mulai aktif di Perwakilan Jawa Tengah setelah tanggal 30 September 2019 dan sebanyak 2 orang mulai tugas belajar di bulan Agustus 2019.

Diklat Fraud Auditing**IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)**

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2019 IK ini belum dapat memenuhi target 100%, dan memperoleh skor 98,72. Capaian ini menurun dari tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	98,72	100%	98,72%	100%	98,68%

Penurunan ini terjadi dikarenakan terdapat Diklat yang tidak dapat diperhitungkan yaitu diklat Kepemimpinan. Capaian ini akan kami tingkatkan pada periode tahun – tahun berikutnya.

Diklat Manajemen Perkantoran



IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Tahun 2019 IK 3.4.1 memperoleh skor 105, realisasi sebesar 87,97% sedangkan target sebesar 80%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018, seperti dalam tabel berikut :

IK	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Realisasi		
				2019	2018	2017
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	105	80%	87,97%	85,39%	88,28%

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras semua lini yang ada di Perwakilan Jawa Tengah, secara umum semua kriteria penghitungan sudah mencapai diatas 80%, hanya saja tingkat efisiensi anggaran masih berada di tingkat 60,25%.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.47.585.366.000,00, kemudian terdapat revisi anggaran pada bulan November 2019 sebesar Rp. 1.120.192.000,00 sehingga anggaran 2019 bertambah menjadi Rp. 48.705.558.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2019 (31 Desember) telah terealisasi sebesar Rp. 46.881.467.948,00 atau 96,25% dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Realisasi	Persentase
1	Januari	Rp. 1.264.510.089,-	2,64%
2	Februari	Rp. 4.681.231.675,-	9,78%
3	Maret	Rp. 2.667.192.027,-	5,57%
4	April	Rp. 7.065.364.965,-	14,85%
5	Mei	Rp. 4.111.299.238,-	8,64%
6	Juni	Rp. 2.035.521.428,-	4,28%
7	Juli	Rp. 5.594.647.156,-	11,76%
8	Agustus	Rp. 2.707.408.022,-	5,69%
9	September	Rp. 3.482.078.949,-	7,32%
10	Oktober	Rp. 3.010.489.712,-	6,33%
11	November	Rp. 5.120.122.445,-	10,51%
12	Desember	Rp. 5.141.602.242,-	10,56%
Total		Rp. 46.881.467.948,-	96,25%



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar **101,52**. Secara umum capaian ini sudah memenuhi target 100, namun masih terdapat IKU dan IK yang belum mencapai target, yaitu: 1) IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK, 2) IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, dan 3) IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Menindaklanjuti IKU dan IK yang masih belum mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hentinya melakukan evaluasi dan perbaikan serta berusaha untuk lebih memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga di periode mendatang pencapaian IKU dan IK bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini, dan kami harapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

SKOR KINERJA APLIKASI PRISMA

Sasaran Kerja		BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah					
Periode		DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2019					
Peta Strategi		Detail Scorecard					
Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score	
↳ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Scorecard	Triwulanan				101.54 ●	
↳ 1 PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMBLIK KEPENTINGAN	Perspektif	Triwulanan				101.75 ●	
↳ SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Sasaran Strategis	Triwulanan				101.75 ●	
↳ 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	75,00%	75,00%	85,72 %	105 ●	
↳ 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke JPH	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	102,00 %	102 ●	
↳ 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	IKU	Triwulanan	1,00	1,00	1,00	100 ●	
↳ 2 PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS	Perspektif	Triwulanan				101.44 ●	
↳ Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Sasaran Strategis	Triwulanan				102.74 ●	
↳ 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	95,00%	95,00%	100,00 %	105 ●	
↳ 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	IKU	Triwulanan	30,00%	25,00%	25,76 %	103.83 ●	
↳ 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TURHP dan Kerugian Negara	Sasaran Strategis	Triwulanan				100 ●	
↳ 1.2.1 Tingkat Kenutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	IKU	Triwulanan	72,00	72,00	72,00	100 ●	
↳ 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	Sasaran Strategis	Triwulanan				101 ●	
↳ 2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ 2.1.2 Indeks Kepuasan Audittee atas Kinerja Pemeriksa BPK	IKU	Triwulanan	3,90	3,90	4,59	105 ●	
↳ 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	
↳ 3 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI	Perspektif	Triwulanan				99.33 ●	
↳ Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan				95.62 ●	
↳ 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	IKU	Triwulanan	5,00	5,00	4,57	91.4 ●	
↳ 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Triwulanan	5,00	5,00	4,86	97.2 ●	
↳ 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●	

↳ Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan				101.44	●
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	IKU	Triwulanan	AA	AA	AA	100	●
↳ 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulanan	95,00%	95,00%	99,01 %	104.22	●
3.2.3 Jumlah Best-Practice yang Disusun	IKU	Triwulanan	1,00	1,00	1,00	100	●
3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100	●
↳ 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100	●
↳ 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	IKU	Triwulanan	91,00%	91,00%	91,60 %	100.66	●
↳ 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	IKU	Triwulanan	3,00	3,00	4,20	105	●
↳ Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan				99.52	●
↳ 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100	●
↳ 3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	98,72 %	98.72	●
3.3.2.1 Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam	Sub IKU	Triwulanan				77,00	●
3.3.2.2 Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja	Sub IKU	Triwulanan				78,00	●
↳ 4 PERSPEKTIF KEUANGAN	Perspektif	Triwulanan				105	●
↳ Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Sasaran Strategis	Triwulanan				105	●
↳ 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	IKU	Triwulanan	80,00%	80,00%	87,97 %	105	●

NOTA DINAS

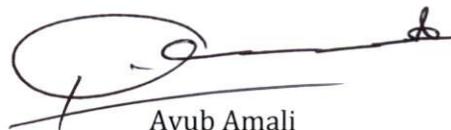
No. 36/ND/XVIII.SMG/01/2020

Kepada Yth. : Tortama KN V
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Tempat, tanggal : Semarang, 31 Januari 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ayub Amali

NIP 196903211996031002

Tembusan:

- Inspektur Utama
- Kaditama Revbang